

SISWA BERTANYA PEMILU MENJAWAB: PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF BAGI SISWA DI SMA NEGERI 11 GORONTALO UTARA

Lucyane Djaafar¹, Ramli Mahmud², Afreldi Patamani³

^{1,2,3} Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial,
Universitas Negeri Gorontalo

e-mail: lucyane.djaafar@ung.ac.id¹, ramlimahmud33@ung.ac.id², rendypt2304@gmail.com³

Abstrak

Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mempersiapkan siswa SMA Negeri 11 Kabupaten Gorontalo Utara agar menjadi pemilih pemula yang lebih peka terhadap kerawanan pelanggaran Pemilu tahun 2024. Fokus utama kegiatan ini adalah meningkatkan kesadaran siswa mengenai pentingnya pengawasan partisipatif dalam Pemilu serta meningkatkan pemahaman mereka dalam bidang politik. Kegiatan dilaksanakan melalui metode sosialisasi dengan model ceramah dan sesi tanya jawab, dengan tema "Siswa Bertanya, Pemilu Menjawab." Metode pengabdian ini melibatkan dua tahap, yaitu persiapan dan pelaksanaan. Tahap persiapan melibatkan persiapan materi, sumber daya, dan logistik yang diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan sosialisasi. Tahap pelaksanaan melibatkan Dosen dan Mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), serta peserta kegiatan yang terdiri dari siswa-siswi. Hasil dari pengabdian ini mencerminkan peningkatan dalam kesiapan dan partisipasi siswa dalam pengawasan Pemilu. Selain itu, kegiatan ini juga berhasil mencapai perubahan positif dalam pemahaman, kesadaran, pengetahuan, serta preferensi politik siswa. Semua perubahan ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan Pemilu yang lebih inklusif, transparan, dan demokratis.

Kata kunci: Siswa, Pengawasan, Partisipatif, Pemilu

Abstract

This community service aims to prepare students of SMA Negeri 11 North Gorontalo Regency to become novice voters who are more sensitive to the vulnerability of violations in the 2024 election. The main focus of this activity is to increase students' awareness of the importance of participatory supervision in elections and increase their understanding in the political field. Activities were carried out through socialization methods with lecture models and question and answer sessions, with the theme "Students Ask, Elections Answer." This method of devotion involves two stages, namely preparation and execution. The preparatory stage involves the preparation of materials, resources, and logistics necessary for the organization of socialization activities. The implementation stage involved lecturers and students from the Pancasila and Civic Education Study Program (PPKn), as well as activity participants consisting of students. The results of this dedication reflect improvements in students' readiness and participation in election supervision. In addition, this activity also succeeded in achieving positive changes in students' understanding, awareness, knowledge, and political preferences. All these changes aim to support the implementation of more inclusive, transparent, and democratic elections.

Keywords: Students, Supervision, Participative, Elections

PENDAHULUAN

Dalam Ketentuan Pasal 198 Ayat 1 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjelaskan pemilih pemula adalah warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berusia 17 tahun atau lebih, sudah kawin yang mempunyai hak memilih. Pahmi (2010:54) mengemukakan bahwa Pemilih adalah warga negara Indonesia yang telah genap berusia 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin. Hubungan rujukan tersebut dengan proposal pengabdian ini adalah para siswa di SMA Negeri 11 Gorontalo Utara yang akan memilih pada Pemilu serentak Tahun 2024. Sebagai pemilih pemula, siswa harus disuguhkan dengan berbagai informasi tentang Pemilu terutama mengenai pengawasan partisipatif. Keberhasilan atas program pengabdian ini akan sangat erat dengan dukungan dari kelompok mitra termasuk sekolah dan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara.

Hubungannya hal tersebut di atas, (Ramadhanil, et al., 2015) mengemukakan bahwa Kemitraan atau Partnership dalam tata pemerintahan sangat membantu dan mendorong pembauran dalam melaksanakan tugas pemerintah termasuk penyelenggara Pemilu. Oleh sebab itu, keterlibatan lembaga Perguruan Tinggi dalam mengambil bagian untuk meningkatkan kognitif siswa sebagai pemilih pemula dalam membangun kesadaran kolektif pengawasan partisipatif merupakan tanggung jawab moral pengabdian kepada masyarakat. (Surbakti, 2015) Pelaksanaan program pendidikan politik, kaderisasi, dan upaya menampung aspirasi konstituen (representasi politik) sangat jarang dilakukan. Atas hal tersebut maka, ketepatan pengabdian ini sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan secara kelembagaan baik perguruan tinggi maupun lembaga penyelenggara serta pemerintah daerah dalam hal ini SMA Negeri 11 Gorontalo Utara.

(Primadi, et al., 2029) mengemukakan bahwa proses inovasi diwujudkan melalui program kelas pengawasan pemilu dengan merumuskan agen pengawasan pemilu partisipatif efektif meningkatkan partisipasi dan kesadaran politik pemilih pemula. (Bidja, 2022) berkesimpulan bahwa pengawasan partisipatif memegang peranan yang strategis saat pembentukan hukum pemilu yang responsif dan memihak pada masyarakat. (Kurniawansyah & Alqadri, 2021) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan merupakan suatu kehendak yang didasari keprihatinan luhur, demi tercapainya Pemilu yang berkualitas. Dengan demikian Prinsip-prinsip umum yang harus dimiliki adalah saling menghormati dan tidak dalam keadaan terpaksa, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, terencana, terukur serta profesional, efektif dan efisien.

(Surbakti, 2015) mengemukakan bahwa praktik pengawasan Pemilu memiliki beberapa sifat yang berbeda. Secara umum praktik pengawasan Pemilu dibedakan menjadi tiga tipologi, pertama, Electoral Observation, tugas dari observer sebatas mengumpulkan informasi seputar pelaksanaan pemilu dan memberikan simpulan atas pelaksanaan pemilu dengan memberikan penilaian (value judgement) terhadap proses penyelenggaraan Pemilu. Kedua, Electoral Monitoring, praktik pengawasan ini sudah memiliki otoritas atau legitimasi untuk melakukan pengamatan pada pelaksanaan pemilu dan memiliki kewenangan untuk mengintervensi proses jika ada norma pemilu yang dilanggar. Ketiga, Electoral Supervisory, adalah lembaga pengawas pemilu.

Merujuk pada apa yang telah dikemukakan di atas, pengabdian ini lebih fokus pada praktek Electoral Observation, dimana penyelenggara dalam hal ini perguruan tinggi dan sekolah mengumpulkan informasi serta kesimpulan dan penilaian atas preferensi politik siswa melalui tingkat kesadaran pengawasan partisipatif siswa menjelang Pemilu serentak Tahun 2024. Hal ini cukup beralasan, temuan (Irawan, 2011) bahwa pengawasan partisipatif dalam Pemilu maupun Pilkada kurang optimal karena masih terdapat banyak kerawanan dan pelanggaran yang dilakukan oleh para kontestan maupun partai politik. (Mahmud, et al., 2022) pendidikan politik pemilih pemula dalam hal ini siswa SMA sederajat sangat penting untuk dilakukan menjelang pemilu yang partisipatif, rasional serta ideal dalam mengawal Pemilu yang berintegritas di tahun 2024. Sosialisasi atau penyuluhan sangat penting dilakukan dalam rangka membangun kesadaran siswa sebagai salah satu elemen penting dalam pengawasan partisipatif menjelang Pemilu.

Temuan permasalahan awal menunjukkan Secara keseluruhan, masalah yang dihadapi oleh siswa sebagai pemilih pemula maupun pemilih pemula pada umumnya adalah tingkat kognitifnya terhadap pemilu dan isu-isu politik kebangsaan. Disisi lain, kesadaran terhadap pengawasan partisipatif dalam pemilu juga sangat rendah, masih terdapat banyak kerawanan pelanggaran serta pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh kontestan maupun partai politik peserta Pemilu. kurangnya Pendidikan politik membuat sebagian besar siswa apatis terhadap Pemilu, sementara itu posisi dan keberadaan mereka sebagai kelompok potensial yang harus diberikan ruang untuk melakukan pengawasan partisipatif oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara masih kurang. Untuk, atas dasar permasalahan tersebut Terdapat beberapa ulasan mendasar tentang dukungan potensi pelaksanaan pengabdian ini antara lain; (1) Adanya dukungan Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo dan Sekolah SMA Negeri 11 Gorontalo Utara dalam Pelaksanaan pengabdian bertajuk penguatan pengawasan partisipatif bagi siswa sebagai pemilih pemula; (2) Adanya dukungan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara dalam Penguatan Pengawasan Partisipatif warga masyarakat; (3) Adanya keinginan bagi semua stakeholder termasuk KPU dan Bawaslu dalam proses Pendidikan politik bagi kelompok pemilih pemula di Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara.

METODE

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini, digunakan metode sosialisasi dengan model ceramah dan tanya jawab dengan tema "Siswa Bertanya Pemilu Menjawab." Pendekatan edukatif difokuskan pada dua aspek kunci, yaitu memperkuat pemahaman peran siswa dalam pengawasan partisipatif menjelang Pemilu Serentak Tahun 2024 dan membentuk kesadaran kolektif siswa terhadap pentingnya partisipasi mereka dalam pengawasan partisipatif. Kegiatan ini terstruktur dalam dua tahap, yaitu persiapan dan pelaksanaan, yang melibatkan 2 orang dosen dan 11 mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), serta 25 peserta yang terdiri dari siswa-siswi di SMAN 11 Gorontalo Utara. Dengan pendekatan yang terarah ini, tujuan adalah memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada peserta mengenai peran kunci mereka dalam pengawasan Pemilu yang bertujuan untuk mendukung Pemilu yang lebih transparan dan demokratis pada tahun 2024.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penguatan Peran Pengawasan Partisipatif (*Strengthening the Role of Participatory Supervision*)

Penguatan ini merujuk pada upaya untuk meningkatkan dan memperkuat peran individu atau kelompok dalam pengawasan partisipatif dalam sebuah konteks tertentu, seperti pemilihan umum. Pengawasan partisipatif adalah proses di mana masyarakat, termasuk siswa dalam konteks yang disebutkan, aktif terlibat dalam mengawasi proses politik atau pemilu, dengan tujuan untuk memastikan transparansi, integritas, dan keadilan dalam proses tersebut. Penguatan peran pengawasan partisipatif mencakup peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas individu atau kelompok untuk efektif berpartisipasi dalam pengawasan dan pemantauan. Urgensi penguatan peran ini juga berkesesuaian dengan apa yang dikemukakan oleh Primadi, at.,al (2019) Pemilu yang berkualitas dan memiliki integritas yang kuat dapat tercapai melalui pelaksanaan pemilu yang transparan, adil, dan jujur. Ini dapat diwujudkan dengan mendukung proses pemilu melalui pemantauan partisipatif, serta melibatkan elemen masyarakat sipil dalam mengawasi proses ini, yang bertujuan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan dan mengurangi risiko tindakan curang sejak tahap awal.

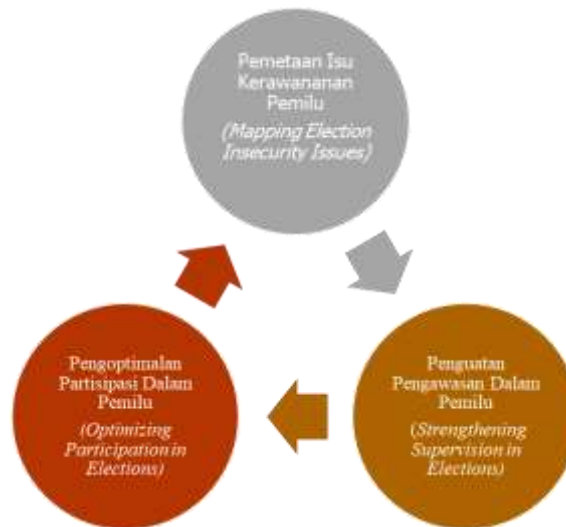
Untuk itu, apabila mengoptimalkan pengawasan partisipatif dapat dilakukan dengan 2 cara; (1) Memperkuat peran masyarakat Sipil. Masyarakat sipil yang dimaksudkan adalah Siswa/Siswi di SMAN 11 Gorontalo utara yang harus berani mengambil tindakan berupa pemantauan pemantauan langsung terhadap tahap-tahap pemilu, memastikan integritas proses, dan melaporkan ketidakberesan manakalah ada hal-hal yang bersifat merugikan kepentingan umum. (2) Ikut Serta Dalam Tahap Awal. Pada posisi ini, pentingnya mengawasi pemilu sejak tahap awal untuk mengurangi peluang terjadinya kecurangan. Siswa di SMAN 11 Gorontalo Utara dapat berperan dalam mengawasi tahap-tahap awal pemilu, seperti proses pendaftaran pemilih, perencanaan, dan persiapan logistik. Dengan demikian, mereka membantu memastikan bahwa pemilu dimulai dengan dasar yang kuat dan transparan.



Gambar 1. Edukasi & Sesi Diskusi Pengawasan Partisipatif Siswa Dalam

Gambar 1. Terlihat antusiasme yang sangat tinggi dari siswa dan siswi dalam mendengarkan materi mengenai Penguatan Pengawasan Partisipatif Bagi Siswa di SMA Negeri 11 Gorontalo Utara terkait dengan pemilihan umum. Mendukung urgensi pelaksanaan indikator ini adalah pertimbangan yang berkaitan dengan potensi peserta pengabdian itu sendiri, yang meliputi dua aspek utama: (1) Siswa dan siswi adalah kelompok pemilih potensial yang memiliki peran vital sebagai pemilih pemula dalam pemilihan umum. (2) Siswa/Siswi memiliki potensi untuk menjadi mitra yang efektif dalam

mengawasi dan melaporkan potensi kerawanan serta pelanggaran yang terkait dengan Pemilu Serentak 2024 di Kecamatan Gentuma. Adapun pola penguatan yang dilakukan guna membentuk pengawasan partisipatif Siswa/Siswi menyangkut pemilu sebagai berikut:



Gambar 2. Skema Penguatan Pengawasan Partisipatif Pada Siswa/Siswi

Adapun urian skema pola diatas diantaranya sebagai berikut; (1) Pemetaan Isu Kerawanan Pemilu (*Mapping Election Insecurity Issues*): Dalam konteks siswa/siswi di SMAN 11 Gorontalo Utara, pemetaan isu kerawanan pemilu merupakan proses untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah atau ancaman yang mungkin timbul selama proses pemilihan umum. Ini bisa mencakup ancaman seperti intimidasi terhadap pemilih muda, ketidaksetaraan akses pemilih, atau isu-isu keamanan selama pemilu. Melalui pemetaan isu kerawanan, siswa/siswi dapat memahami risiko dan tantangan yang mungkin dihadapi selama pemilu, yang pada gilirannya dapat membantu mereka merencanakan tindakan pencegahan atau strategi untuk mengatasi isu-isu ini. (2) Penguatan Pengawasan Dalam Pemilu (*Strengthening Supervision in Elections*): Untuk siswa/siswi di SMAN 11 Gorontalo Utara, penguatan pengawasan dalam pemilu berarti meningkatkan kemampuan mereka dalam memantau, mengawasi, dan melaporkan berbagai aspek pemilihan umum. Ini mencakup memberikan pelatihan kepada siswa/siswi untuk memahami peran mereka dalam pengawasan pemilu, seperti menjadi pengawas pemilu atau pengamat pemilu. Penguatan pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa pemilu berlangsung dengan integritas dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. (3) Pengoptimalan Partisipasi Dalam Pemilu (*Optimizing Participation in Elections*): Dalam konteks siswa/siswi di SMAN 11 Gorontalo Utara, pengoptimalan partisipasi dalam pemilu adalah upaya untuk meningkatkan tingkat partisipasi mereka dalam pemilihan umum. Ini dapat mencakup penyuluhan mengenai pentingnya hak suara, cara registrasi pemilih, serta penyediaan fasilitas aksesibilitas seperti pemungutan suara yang mudah diakses. Dengan memaksimalkan partisipasi siswa/siswi, tujuannya adalah memastikan bahwa suara mereka didengar dalam proses demokrasi pemilu dan bahwa pemilu mencerminkan kehendak mereka sebagai warga negara yang aktif.

Penguatan Kesadaran Kolektif (*Strengthening Collective Consciousness*)

Konsep membangun kesadaran kolektif dititik beratkan pada proses di mana individu-individu dalam sebuah kelompok atau masyarakat datang bersama untuk mengembangkan pemahaman dan kesadaran bersama tentang isu atau tujuan tertentu. Kesadaran kolektif mencakup pemahaman bersama tentang pentingnya suatu isu atau tindakan yang diperlukan, serta keterlibatan bersama dalam mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks pengabdian ini, membangun kesadaran kolektif di antara siswa berarti menggalang dukungan bersama dan pemahaman tentang peran mereka dalam pengawasan partisipatif dalam pemilihan umum. Pasaribu, at.,al (2023) bahwa Keberhasilan Pemilu sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat terlibat dalam memberikan partisipasi mereka. Apabila diselaraskan dengan kesadaran kolektif Siswa/Siswi dalam pemilu, memberikan penekanan bahwa Tingkat kesadaran kolektif siswa/siswi terhadap proses pemilu dan peran penting mereka dalam pengawasan pemilu menjadi faktor penentu dalam mencapai keberhasilan pemilihan umum yang berkualitas dan berintegritas. Dengan tingkat kesadaran yang tinggi, siswa/siswi akan lebih cenderung terlibat secara aktif dalam mengawasi dan memastikan pemilu berlangsung dengan adil dan transparan, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang diharapkan.

Dalam konteks ini, ada tiga konsep kesadaran yang dibangun melalui pelaksanaan kegiatan pengabdian ini yang dapat dilihat pada tabel berikut: Diantaranya meliputi penguatan; (1) Kesadaran Kognitif: Konsep ini berkaitan dengan tingkat pemahaman dan pengetahuan bersama siswa/siswi tentang proses pemilu, aturan yang berlaku, serta peran dan tanggung jawab mereka dalam pengawasan pemilu. Kesadaran kognitif mencakup pemahaman tentang tahap-tahap pemilu, hak dan kewajiban pemilih, serta metode pengawasan yang efektif. Ini menciptakan dasar pengetahuan yang kuat untuk pengawasan pemilu yang efektif. (2) Kesadaran Afektif: Konsep ini mencakup aspek emosional dalam kesadaran bersama siswa/siswi tentang pemilu. Ini mencakup perasaan antusiasme, tanggung jawab, dan keterlibatan emosional mereka terhadap proses pemilu. Tingkat kesadaran afektif yang tinggi dapat memotivasi siswa/siswi untuk terlibat secara aktif dalam pengawasan pemilu karena mereka merasa penting dan termotivasi untuk menjaga integritas pemilu. (3) Kesadaran Evaluatif: Konsep ini berfokus pada kemampuan siswa/siswi untuk secara bersama-sama mengevaluasi dan menganalisis situasi pemilu, termasuk mengidentifikasi potensi kerawanan dan pelanggaran. Ini mencakup kemampuan mereka untuk secara kritis menilai informasi, data, dan peristiwa yang berkaitan dengan pemilu. Kesadaran evaluatif memungkinkan mereka untuk secara efektif mengawasi dan memastikan pemilu berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.



Gambar 3. Foto Bersama Bersama Peserta Kegiatan Pengabdian

Dengan memahami ketiga konsep kesadaran ini, siswa/siswi dapat membentuk kesadaran kolektif yang kuat, yang pada gilirannya akan mendukung peran mereka dalam pengawasan pemilu dan upaya menjaga keberhasilan Pemilu 2024. Untuk itu, hasil capaian pelaksanaan kegiatan ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Hasil Capaian Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

No	Pra Pelaksanaan Pengabdian	After Pelaksanaan Pengabdian
1	Kurangnya pengetahuan siswa terhadap Pemilu dan isu politik kebangsaan lainnya menjelang Pemilu.	Siswa/Siswi mengalami peningkatan pengetahuan mereka tentang Pemilu dan isu politik kebangsaan lainnya yang relevan menjelang Pemilu. Mereka lebih akrab dengan berbagai aspek Pemilu dan isu-isu yang berkaitan.
2	Siswa kurang menyadari perannya sebagai kelompok potensial pengawasan partisipatif	Siswa/Siswi kini lebih sadar akan peran mereka sebagai kelompok potensial pengawasan partisipatif dalam Pemilu. Mereka memahami pentingnya peran mereka dalam memastikan Pemilu yang transparan dan adil.

3	Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu khususnya pengawasan partisipatif.	Upaya sosialisasi yang dilakukan oleh Dosen dan Mahasiswa Prodi PPKn terutama terkait pengawasan partisipatif, telah membantu siswa/Siswi di SMAN 11 Gorontalo Utara dalam memahami lebih baik menyangkut konsep pengawasan partisipatif dan bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam pemilu.
---	---	---

Tabel 1 di atas adalah gambaran yang jelas dan komprehensif tentang perubahan pemahaman yang terjadi pada siswa/siswi di SMAN 11 Gorontalo Utara mengenai pengawasan partisipatif dalam konteks Pemilu. Tabel ini mencerminkan hasil dari sebuah kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa/siswi tentang pentingnya peran mereka dalam menjaga integritas dan transparansi Pemilu.

SIMPULAN

Dalam pelaksanaan kegiatan, terlihat antusiasme yang sangat tinggi dari siswa dan siswi dalam memahami penguatan pengawasan partisipatif dalam konteks pemilihan umum. Hal ini mencerminkan urgensi dari indikator ini karena siswa/siswi adalah kelompok pemilih potensial yang memiliki peran vital sebagai pemilih pemula dalam pemilihan umum. Mereka juga memiliki potensi untuk menjadi mitra efektif dalam mengawasi dan melaporkan potensi kerawanan dan pelanggaran yang terkait dengan Pemilu Serentak 2024 di Kecamatan Gentuma. Dalam pelaksanaan kegiatan, tiga konsep kesadaran dibangun: Kesadaran Kognitif, Kesadaran Afektif, dan Kesadaran Evaluatif. Kesadaran kognitif berfokus pada pengetahuan bersama siswa/siswi tentang proses pemilu, aturan yang berlaku, serta peran dan tanggung jawab mereka dalam pengawasan pemilu. Kesadaran afektif mencakup aspek emosional dalam kesadaran bersama siswa/siswi terhadap pemilu, termasuk perasaan antusiasme dan tanggung jawab. Kesadaran evaluatif berfokus pada kemampuan siswa/siswi untuk mengevaluasi dan menganalisis situasi pemilu serta mengidentifikasi potensi kerawanan dan pelanggaran. Hasil pengabdian mencerminkan perubahan positif dalam pemahaman dan kesadaran siswa/siswi. Mereka telah mengalami peningkatan pengetahuan tentang pemilu dan isu-isu politik, menyadari peran penting mereka dalam pengawasan partisipatif, dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang konsep tersebut melalui upaya sosialisasi. Hasil ini menunjukkan bahwa siswa/siswi siap dan terinformasi untuk berperan aktif dalam mendukung kelancaran dan integritas Pemilu 2024. Penguatan peran pengawasan partisipatif dan kesadaran kolektif siswa/siswi dalam pemilihan umum adalah langkah krusial dalam mendukung proses demokratis dan pemilihan umum yang berkualitas. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang pemilu dan peran mereka dalam pengawasan, siswa/siswi di SMAN 11 Gorontalo Utara dapat menjadi pemilih pemula yang cerdas dan aktif dalam menjaga integritas pemilu di masa depan.

SARAN

Untuk meningkatkan efektivitas pengabdian di masa depan, beberapa saran yang perlu dipertimbangkan adalah mengintensifkan pelatihan dan sosialisasi siswa, terus mengembangkan program kesadaran kolektif untuk siswa, mendorong partisipasi siswa dalam tahap awal pemilu, melanjutkan pengembangan konten pendidikan politik yang relevan, melakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan untuk mengukur dampak kegiatan, serta mempertimbangkan pengembangan model yang dapat direproduksi dan mengupayakan kolaborasi dengan pihak eksternal untuk mendukung upaya pengawasan partisipatif siswa. Dengan langkah-langkah ini, kita dapat memastikan bahwa siswa/siswi menjadi pemilih pemula yang lebih siap dan aktif dalam menjaga integritas pemilu.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak Sekolah SMAN 11 Gorontalo Utara atas dukungan, kerjasama, dan fasilitas yang telah diberikan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Terimakasih juga kepada peserta didik (Siswa/Siswi) yang telah berperan aktif dan berkomitmen dalam memahami serta mewujudkan pengawasan partisipatif dalam pemilihan umum. Kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Fakultas Ilmu Sosial yang telah memberikan dukungan penuh dalam mensupport kegiatan pengabdian ini. Semua pihak

telah berperan penting dalam keberhasilan inisiatif ini, dan kami sangat menghargai kontribusi dan partisipasi mereka. Terimakasih atas kolaborasi yang luar biasa dalam memajukan pemahaman demokrasi dan partisipasi aktif dalam mewujudkan pengawasan pemilu yang jujur dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Bidja, I., 2022. Fungsi Pengawasan Partisipatif Dalam Mewujudkan Pemilu Demokratis. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, 6(1), pp. 2034-2041.
- Hajad, V. et al., 2020. Pelatihan Wawasan Politik Islam Pada Siswa MAS Darul Hikmah Meureubo Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar*, 2(1), pp. 95-106.
- Haris, A. & Dardum, A., 2021. Kiai NU Dan Politik (Keterlibatan Kiai NU JEMBER Dalam Kontestasi PILPRES 2019). *Jurnal Fenomena*, 20(1), pp. 91-114.
- Irawan, D., 2011. Kampung Pengawasan Partisipatif dan Road Map Indeks Kerawanan Pemilu Di Kabupaten Indramayu. *Jurnal Adhyasta Pemilu (JAP)*, 5(1), pp. 19-31.
- Kurniawansyah, E. & Alqadri, B., 2021. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bagi Pemilih Pemula Pada Pilkada Di Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 4(2), pp. 286-293.
- Latifah, N. L. D. (2020). Model Pengawasan Partisipatif Bawaslu Diy Pada Pemilu Serentak 2019 (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).
- Mahmud, R., Wantu, S. M., Hamim, U. & Polone, P., 2022. Sosialisasi Penguatan Preferensi Politik Siswa Sma Negeri 1 Pinogaluman Menjelang Pemilu Serentak 2024. *J. Dinamika*, 7(3), pp. 526-532.
- Pasaribu, J., Gea, S. D. N., Hutasoit, R. F., & Lumbantobing, A. N. (2023). Penguatan Kesadaran Politik Warga Kelompok Tani Terpadu Martubung Kecamatan Medan Labuhan Menghadapi Pemilu 2024. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 4(3), 2654-2657.
- Primadi, A., Eefendi, D. & Sahirin, 2029. Peran Pemilih Pemula Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif (Studi Kasus : Kelompok Agen Pengawasan Bawaslu Bangka Selatan). *Journal of Political Issues*, 1(1), pp. 63-73.
- Ramadhanil, F., Jurnaedi, V. & Ibrohim, 2015. Desain Partisipasi Masyarakat Dalam Pemantauan Pemilu. 1 ed. Jakarta: Kemitraan Partnership dan Perludem.
- Redhani, M. E., Fitri, M. S., Khalid, A. & Hanafi, 2020. Sosialisasi Pemilu Kepada Pemuda Guna Menciptakan Pemuda Yang Sadar Pemilu Di Kota Banjarmasin. *Jurnal Pengabdian Al-Ikhlash*, 6(1), pp. 118-123.
- Rohim, M., & Wardana, A. (2019). Analisis Politik Millennial: Persepsi Siswa SMA Terhadap Dinamika Politik Pada PEMILU 2019 di Indonesia. *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan): Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 4(1), 47-63.
- Surbakti, R., 2015. Transformasi Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu. 1 ed. Jakarta: Kemitraan Partnership.
- Syarif, Z., 2016. Pergeseran Perilaku Politik Kiai dan Santri di Pamekasan Madura. *Jurnal Al-Tahrir*, 16(2), pp. 293-311.